



**PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA
INTEGRASI BIMBINGAN MANAJEMEN KEUANGAN
KELUARGA DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

**BIDANG KEGIATAN:
PKM-GT**

Diusulkan oleh :

Ketua Pelaksana	:	Agus Surachman	I24070026	2007
Anggota	:	Astari Sukmaningtyas	I24070030	2007
		Diara Mutiarani	I24080083	2008

**DEPARTEMEN ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2010**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Integrasi Bimbingan Manajemen Keuangan Keluarga dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia
2. Bidang Kegiatan : () PKM-AI (V) PKM-GT
3. Nama Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Agus Surachman
 - b. NIM : I24070026
 - c. Jurusan : Ilmu Keluarga dan Konsumen
 - d. Universitas/Institut/Politeknik : Institut Pertanian Bogor
 - e. Alamat Rumah dan No. HP : Jalan Babakan Raya 2 No. 218 Desa Babakan Kecamatan Darmaga Kabupaten Bogor 16680 No. HP: 085710275853
 - f. Alamat email : surachman_agus@ymail.com
4. Anggota Pelaksana Kegiatan : 2 orang
5. Dosen Pembimbing
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Megawati Simanjuntak, SP., M.Si.
 - b. NIP : 19721103 200501 2 002
 - c. Alamat Rumah dan No. HP : Perumahan Alam Sinarsari Jl. Angrek Blok C/ 31 No. HP: 081310870695

Bogor, 25 Maret 2010

Ketua Departemen
Ilmu Keluarga dan Konsumen

Ketua Tim

(Dr. Ir. Hartoyo, M.Sc.)
NIP. 19630714 198703 1 002

(Agus Surachman)
NIM. I24070026

Wakil Rektor Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan

Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS.)
NIP. 19581228 198503 1 003

(Megawati Simanjuntak, SP., M.Si.)
NIP. 19721103 200501 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kemampuan kepada kita untuk menyelesaikan proposal kegiatan ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Megawati Simanjuntak, SP., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan proposal ini.

Kami sadar bahwa proposal yang kami susun masih terdapat kesalahan-kesalahan, maka dari itu kami mohon saran dan kritik yang bersifat membangun terhadap proposal ini, supaya di masa yang akan datang kami bisa menyusun proposal dengan lebih baik.

Penyusun

RINGKASAN

Pengentasan kemiskinan menjadi perhatian utama pemerintahan di Indonesia saat ini. terdapat 68 program pada tahun 2002 dan 42 program pada tahun 2005 yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun, jumlah penduduk miskin di Indonesia tetap besar dengan proporsi diatas 10 persen hingga tahun 2008. Padahal, Indonesia memiliki *deadline* MDGs di tahun 2015 untuk menurunkan jumlah penduduk miskin hingga angka 7,5 persen.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 memulai untuk menerapkan program pengentasan kemiskinan yang bersifat komprehensif dengan mengadopsi program *Conditional Cash Transfer* (CCT), yang dinamakan Program Keluarga Harapan (PKH), dimana keluarga sangat miskin (RTSM) sasaran diberikan bantuan tunai untuk peningkatan konsumsi dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, program ini ditujukan bagi RTSM yang memiliki ibu hamil dan/atau anak usia di bawah lima tahun dan/atau anak usia sekolah (Kharisma 2008).

Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah memutus rantai kemiskinan. Bantuan tunai dalam PKH ditujukan untuk menaikkan derajat hidup penduduk miskin dengan meningkatkan tingkat konsumsinya. Di sisi lain, program ini berupaya untuk meningkatkan kualitas generasi selanjutnya dari keluarga miskin dengan memberikan mereka akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Bagaimana keluarga sebagai target dari PKH mengalokasikan uang mereka, terutama bantuan tunai yang diberikan, menjadi isu yang menarik karena hal tersebut sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan program tersebut. Temuan Simanjuntak (2010) menunjukkan bahwa 70 persen keluarga sasaran PKH di Kecamatan Darmaga melakukan manajemen keuangan keluarga yang sangat rendah. Implikasi dari hal tersebut: hanya 0.5% dari bantuan tunai yang digunakan untuk kepentingan kesehatan; kecenderungan menggunakan dana bantuan untuk membeli sejumlah aset seperti alat elektronik; dan peningkatan jumlah keluarga sasaran PKH yang memiliki hutang setelah program dilaksanakan.

Keluarga sasar PKH membutuhkan bimbingan dalam hal mengalokasikan dan menggunakan uang yang mereka miliki dengan benar; hal tersebut sejalan dengan tujuan program tersebut untuk meningkatkan ketahanan keluarga sasaran PKH. Pada dasarnya, manajemen sumberdaya – terutama uang – bagi keluarga miskin sangat dibutuhkan karena kelangkaan (*scarcity*) benar-benar mereka hadapi. Untuk itu, integrasi bimbingan manajemen keuangan keluarga dalam PKH sangat dibutuhkan.

Pelaksanaan bimbingan manajemen keuangan tersebut diintegrasikan dengan kegiatan pembimbingan keluarga sasaran PKH oleh para pendamping. dengan demikian, peran pendamping menjadi sangat vital dalam implementasi program ini. Para pendamping harus diberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai manajemen keuangan keluarga agar proses pembimbingan dapat berjalan dengan baik. Revitalisasi kegiatan pembimbingan dalam pelaksanaan PKH harus mendapatkan perhatian, terkait dengan jumlah fasilitator, ukuran kelompok, dan koordinasi diantara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan.....	2
Manfaat.....	2
TELAAH PUSTAKA	3
Kemiskinan.....	3
Keluarga Miskin dan Manajemen Sumberdaya	5
Program Keluarga Harapan (PKH)	6
METODE PENULISAN	7
GAGASAN	8
Kondisi Kemiskinan di Indonesia	8
Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Pemberdayaan Keluarga Miskin	8
PENUTUP	
Kesimpulan.....	13
Saran.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15
LAMPIRAN	16

DAFTAR TABEL

Besar bantuan yang diberikan pada keluarga penerima PKH.....	7
--	---

DAFTAR GAMBAR

Rantai lingkaran perangkap kemiskinan	4
Konsep dasar Program Keluarga Harapan (PKH)	9
Manajemen keuangan keluarga sebagai komplemen dalam Program Keluarga Harapan	10
Manajemen keuangan keluarga penerima PKH.....	12
Pendampingan sasaran PKH terintegrasi bimbingan manajemen keuangan keluarga	13

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup Peserta.....	16
-----------------------------------	----

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Millennium Summit pada September 2000 yang dihadiri oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghasilkan suatu kesepakatan yang disebut *Millennium Declaration*. Kesepakatan tersebut berisi delapan komitmen yang harus dicapai oleh setiap negara yang meratifikasinya pada tahun 2015. Masyarakat di seluruh dunia mengenal delapan komitmen tersebut sebagai *Millennium Development Goals* (United Nations 2003). Satu dari delapan komitmen tersebut adalah memberantas kemiskinan global. Indikator keberhasilan untuk target tersebut yaitu penurunan angka kemiskinan sebesar 50% pada tahun 2015 dari angka pada tahun 1990. Sekitar 15% penduduk Indonesia pada tahun 1990 digolongkan kedalam penduduk miskin. Itu berarti, pada tahun 2015 diharapkan angka proporsi kemiskinan bisa turun hingga 7,5% dari total keseluruhan penduduk.

Negara-negara berkembang seperti Indonesia mendapat perhatian dunia dalam hal pencapaian target MDGs terutama untuk masalah pemberantasan kemiskinan. Proporsi penduduk miskin dunia sebagian besar berada di negara berkembang. Sehingga program pengentasan kemiskinan selalu menjadi fokus utama pemerintah di negara-negara berkembang. Pada tahun 2002 setidaknya terdapat 68 program pengentasan kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, lalu pada tahun 2005 jumlahnya menjadi 42 program. Dana yang telah dikeluarkan pun tentunya bukan jumlah yang sedikit. Untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp14,1 triliun untuk tahun 2008 dan Rp 3,4 triliun untuk program PNPM pada tahun 2007 (Hamid 2007).

Kebijakan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum memperlihatkan hasil maksimal. Angka proporsi penduduk miskin di Indonesia yang dikeluarkan BPS beberapa tahun terakhir masih bersifat fluktuatif. Sempat menurun di tahun 2004 hingga 2005 ke level 16%, namun angka penduduk miskin kembali meningkat pada tahun 2006 menjadi 17,8% akibat kenaikan harga bahan bakar minyak pada tahun 2005 yang menyebabkan kenaikan harga-harga komoditas lain. Data yang dirilis BPS pada tahun 2008 menyebutkan proporsi penduduk miskin adalah sebesar 15,4%. Sementara proyeksi dari *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) memperkirakan jumlah penduduk miskin sebesar 16,82% pada tahun 2009 yang berarti terdapat peningkatan kembali jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Program pemberantasan kemiskinan di Indonesia saat ini terbagi ke dalam tiga klaster, yaitu klaster bantuan sosial, klaster program-program pemberdayaan masyarakat, dan klaster program UMKM untuk kemandirian masyarakat. Ketiga program tersebut mempunyai sasaran masing-masing, kluster bantuan sosial ditujukan untuk rumah tangga miskin, kluster pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat miskin, dan kluster program UMKM ditujukan untuk masyarakat yang memiliki usaha dan layak menerimanya. Seluruh program berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat bekerjasama dengan departemen atau lembaga terkait seperti Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, dan Bulog.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan dengan sasaran keluarga. Program tersebut merupakan adopsi dari *Cash Conditional Program* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat yang telah dilakukan di sejumlah negara di wilayah Amerika Selatan dan Karibia. Berbeda dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), PKH ditujukan bagi keluarga dengan karakteristik rumah tangga sangat miskin dan memiliki anak yang bersekolah atau balita ataupun ibu hamil.

Kemampuan keluarga sasaran dalam mengelola bantuan tunai dari PKH menjadi salah satu isu sentral program tersebut. Keluarga dari kalangan miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah cenderung berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masa kini atau sekarang. Hasil temuan Simanjuntak (2010) pada keluarga sasaran PKH di Kecamatan Darmaga menunjukkan bahwa 70% contoh melakukan manajemen keuangan keluarga yang tergolong rendah. Kemampuan untuk melakukan manajemen sumberdaya terutama uang mutlak diperlukan bagi keluarga sasaran PKH agar bantuan tunai yang diberikan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Untuk itu, diperlukan suatu bimbingan bagi keluarga penerima PKH agar mereka dapat mengelola keuangannya dengan baik dan memanfaatkan bantuan yang diberikan sebagaimana mestinya.

Tujuan

Tujuan umum dari pembuatan karya tulis ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Indonesia. Adapun tujuan khusus dari pembuatan karya tulis ini yaitu:

1. Menganalisis Program Keluarga Harapan sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia
2. Menganalisis peran manajemen keuangan keluarga dalam rangka mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH)
3. Menganalisis proses pelaksanaan bimbingan manajemen keuangan keluarga bagi sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Manfaat

Adapun manfaat yang ingin didapat dari pembuatan karya tulis ini adalah:

1. Bagi penulis, pembuatan karya tulis ini dapat menambah wawasan penulis terkait topik dan masalah yang diangkat serta kaitannya dengan realitas dalam kehidupan sehari-hari
2. Ide dalam karya tulis ini tentu akan menambah khazanah gagasan terkait dengan topik dan masalah yang diangkat di institusi perguruan tinggi tempat penulis belajar
3. Bagi pemerintah, gagasan dalam karya tulis ini dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih baik. Gagasan dalam karya tulis ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang akan membawa manfaat bagi masyarakat secara umum, terutama masyarakat miskin

TELAAH PUSTAKA

Kemiskinan

Definisi kemiskinan menurut World Bank adalah kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia yang bisa berupa fisik dan sosial. Kekurangan fisik adalah ketidakcukupan kebutuhan dasar materi dan biologis (*basic material and biological needs*), termasuk kekurangan nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Di sisi lain, ketidakcukupan sosial adalah adanya risiko kehidupan, kondisi ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kepercayaan diri yang kurang (Syafrian 2009).

Sementara itu, BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. BPS membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan dalam menggolongkan penduduk kedalam miskin atau tidak miskin (Anonim 2009).

Pemberdayaan

Dalam bukunya *Development as Freedom*, Amartya Sen mengatakan bahwa kemiskinan erat kaitannya dengan *Capability Deprivation*, yaitu kemampuan untuk mengakses hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan, dan perumahan. Sen mengatakan bahwa penyebab utama dari kemiskinan adalah karena orang tersebut memiliki akses yang terbatas terhadap pemenuhan hak-hak dasar mereka. Oleh karena itu, Sen mengatakan bahwa untuk memberantas kemiskinan adalah dengan memberikan kesempatan/akses kepada orang miskin terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar mereka (Syafrian 2009).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Hamid 2007).

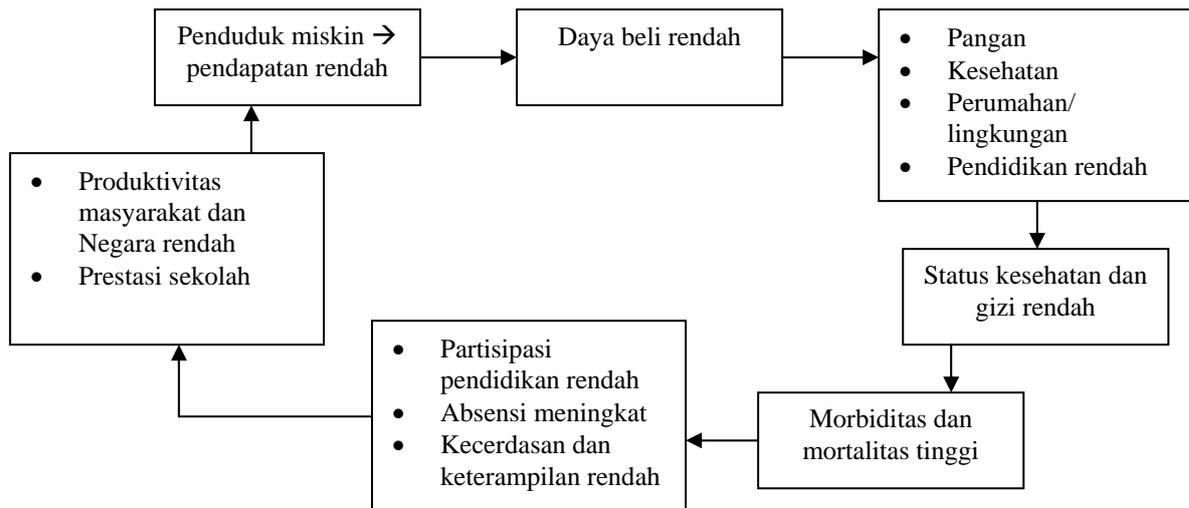
Program Pengentasan Kemiskinan sebagai suatu Pemberdayaan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Diperlukan suatu usaha yang bersifat komprehensif dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Namun pada dasarnya semua pihak sepakat bahwa kemiskinan adalah *ketidakmampuan* dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan adalah membuat penduduk miskin *mampu* memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk hidup atau dengan kata lain bisa disebut sebagai berdaya dan keluar dari kemiskinan.

Ketidakberdayaan penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan disebabkan oleh terperangkapnya penduduk miskin dalam lingkaran kemiskinan

sehingga para pakar berpendapat bahwa pengentasan penduduk dari kemiskinan dapat dilakukan melalui pemutusan rantai lingkaran kemiskinan (Simanjuntak 2010).

Dalam lingkaran kemiskinan tersebut, terdapat tiga hal yang menjadi fokus utama masalah kemiskinan, yaitu daya beli yang rendah yang berimplikasi pada status gizi dan kesehatan yang rendah dan berimbas pada partisipasi pendidikan yang rendah dan rendahnya produktivitas. Oleh karena itu, pemutusan rantai kemiskinan harus fokus pada usaha untuk membuat penduduk miskin berdaya dalam ketiga hal tersebut



Gambar 1 Rantai lingkaran perangkap kemiskinan (Dharmawan *et al* 2009 dalam Simanjuntak 2010)

Keluarga sebagai Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menjalankan berbagai fungsi yang erat kaitannya dengan masalah kesejahteraan. Keluarga menjalankan fungsinya sebagai rumah tangga dimana keluarga menjalankan dua peran yaitu sebagai pembeli dan penjual (Eastwood 1985). Daya beli masyarakat yang rendah akibat rendahnya daya "jual" sumber daya manusia dalam suatu keluarga akan berdampak pada masalah kemiskinan. Rendahnya kualitas SDM tersebut bisa diakibatkan kurangnya investasi yang dilakukan oleh keluarga melalui pendidikan dan kesehatan.

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh keluarga. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan dalam keluarga baik yang bersifat internal maupun eksternal. Megawangi (1999) menyatakan bahwa sebagai suatu subsistem terkecil dalam masyarakat, keluarga berinteraksi dengan subsistem-subsistem lainnya seperti sistem ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan agama. Semua faktor yang berinteraksi dengan keluarga turut mempengaruhi status kesejahteraan keluarga.

Membangun masyarakat yang baik dan sejahtera tentunya harus dimulai dari keluarga yang baik dan sejahtera pula. Untuk itu, keluarga hendaknya menjadi sasaran utama dari program pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan keluarga dikonseptualisasikan sebagai sebuah proses sehingga individu mampu meningkatkan kontrol terhadap kehidupannya (Gutierrez & Ortega; Parsons 1991;

Rappaport 1981; Zimmerman & Rappaport 1988; Resendez *et al.* 2000 dalam Simanjuntak 2010). Pemberdayaan dapat dipenuhi oleh anggota keluarga melalui akses terhadap pengetahuan, skill, dan sumberdaya yang membantu memperbaiki kualitas hidup keluarga (Singh *et al.* 1995; Resendez 2000 dalam Simanjuntak 2010).

Keluarga Miskin dan Manajemen Sumberdaya

Menurut Gunawan (2009), pengertian kemiskinan dalam arti yang lebih luas adalah suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok, sehingga menyebabkan kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial lain. Setidaknya terdapat tiga bentuk potensi yang dapat diamati dalam rangka memahami potensi keluarga miskin, yaitu kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, kemampuan dalam peranan sosial, dan kemampuan dalam menghadapi permasalahan.

Dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, keluarga miskin harus bisa mengelola sumberdaya yang dimilikinya, sehingga manajemen sumberdaya pada keluarga miskin sangat diperlukan agar dapat tetap bertahan hidup dengan keterbatasan yang dimiliki (Latifah 2010). Menurut Guhardja, *et al* (1992) manajemen sumberdaya keluarga adalah penggunaan sumberdaya keluarga dalam usaha atau proses mencapai sesuatu yang dianggap penting oleh keluarga. Nikckell dan Dorsey (1960) membagi manajemen dalam kehidupan keluarga menjadi empat bagian, yaitu manajemen waktu dan energi untuk kegiatan rumah tangga, manajemen keuangan keluarga, manajemen perumahan, dan manajemen lainnya (manajemen makanan, pakaian, transportasi, dan lain sebagainya).

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan sering juga disebut sebagai perencanaan keuangan (*financial planning*). Perencanaan keuangan adalah pengaturan terhadap pendapatan (*income*) dan kekayaan (*wealth*) untuk meraih tujuan (*goals*) yang diinginkan, terutama tujuan-tujuan yang bergantung pada sumberdaya keuangan (*financial*). Manajemen keuangan menekankan pada efisiensi dalam penggunaan akumulasi sumberdaya ekonomi yang ada saat ini (kekayaan pribadi atau *personal wealth*) dan pendapatan pribadi (*personal income*) untuk meraih apapun yang ingin diraih. Manajemen keuangan bukan merupakan cara untuk menjadi kaya, namun jalan untuk meraih tujuan dengan memanfaatkan pendapatan dan kekayaan yang dimiliki (McGowan 1981).

Adapun tahapan dari perencanaan keuangan terdiri dari lima langkah, yaitu menentukan posisi keuangan saat ini; menetapkan tujuan keuangan yang spesifik, terukur, bias dicapai, realistis, dan memiliki jangka waktu; melakukan analisis data; membuat rencana aksi dan menerapkannya; serta memantau dan merevisi perencanaan yang telah dibuat dan dilaksanakan (Karvof 2009).

Manajemen Keuangan Keluarga

Manajemen keuangan keluarga merupakan bagian dari manajemen sumberdaya keluarga secara umum. Pada dasarnya, prinsip manajemen keuangan keluarga sama dengan manajemen keuangan atau perencanaan keuangan pada

umumnya. Hal yang membedakan adalah tujuan utamanya (*ultimate goals*). Tujuan dari manajemen keuangan keluarga merepresentasikan baik tujuan individu maupun tujuan keluarga keseluruhan (Nickell dan Dorsey 1959).

Pemilikan sumberdaya uang dalam suatu keluarga akan relative terbatas, tergantung kepada jumlah dan kualitas orang yang berpartisipasi dalam pencarian pendapatan, sedangkan keinginan dan kebutuhan setiap keluarga dan anggota relative tidak terbatas. Bahkan keinginan dan kebutuhan akan barang atau jasa dari setiap keluarga dan anggotanya dari waktu ke waktu selalu berubah dan cenderung bertambah banyak. Pemenuhan dari keinginan dan kebutuhan dari setiap keluarga dan anggotanya pada dasarnya merupakan bagian dari setiap keluarga. Dengan demikian, agar pemanfaatan sumberdaya uang yang terbatas tersebut mencapai optimum diperlukan usaha manajemen keuangan yang baik dan efektif. Walaupun manajemen tidak bias membuat sumberdaya yang tidak cukup untuk memnuhi kebutuhan dan keinginan menjadi cukup, akan tetapi manajemen dapat membantu menetapkan penggunaan sumberdaya yang terbatas untuk item yang disetujui oleh semua anggota keluarga (Guhardja *et al* 1992)

Nickell dan Dorsey (1959) membagi manajemen keuangan keluarga kedalam lima sub pokok bahasan, yaitu pengaturan pendapatan keluarga, tabungan dan investasi keluarga, perlindungan (asuransi) keluarga, kredit yang dilakukan oleh keluarga, dan proses pencatatan sebagai bagian dari manajemen keuangan keluarga.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika memenuhi persyaratan, yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs.

Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas: (1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM; (2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM; (3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM; (4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada Ibu maka: nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan

dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu PKH.

Tabel 1 Besar bantuan yang diberikan pada keluarga penerima PKH

No.	Skenario Bantuan	Bantuan per RTSM per tahun (Rp)
1	Bantuan tetap	200 000
2	Bantuan bagi RTSM yang memiliki: <ul style="list-style-type: none"> - Anak usia di bawah 6 tahun - Ibu hamil/ menyusui - Anak usia SD/ MI - Anak usia SMP/ MTs 	800 000 800 000 400 000 800 000
3	Rata-rata bantuan per RTSM	1 390 000
4	Bantuan minimum per RTSM	600 000
5	Bantuan maksimum per RTSM	2 200 000

Sumber: Departemen Sosial

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut: (1) UUPKH pusat, yaitu badan yang merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan program dan melakukan pengawasan perkembangan yang terjadi di tingkat daerah serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan; (2) UPPKH Kabupaten/Kota bertugas untuk melaksanakan program dan memastikan bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar serta berperan dalam mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta memberi bantuan jika diperlukan; (3) Pendamping, merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota, termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya.

METODE PENULISAN

Pembuatan karya tulis ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka melalui buku, jurnal, website, skripsi, tesis dan lain sebagainya. Sementara data-data yang digunakan dalam karya tulis ini berasal dari data sekunder yang merupakan hasil penelitian atau survei. Dilakukan juga pengamatan melalui media massa atau pun lingkungan sekitar mengenai kasus-kasus yang terkait dengan topik bahasan. Pelaksanaan penyusunan karya tulis ini berlangsung di Bogor dari tanggal 20 Februari 2010 hingga 24 Maret 2010.

GAGASAN

Kondisi Kemiskinan di Indonesia

Negara Indonesia pernah menjadi sorotan dunia atas keberhasilannya dalam menurunkan jumlah penduduk miskin secara fenomenal. Pada tahun 1976 penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 40%. Proporsi tersebut bisa diturunkan hingga lebih dari setengahnya pada tahun 1990 (15,1%) melalui program kebijakan pembangunan yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi. Angka penduduk miskin terus mengalami penurunan sebelum krisis di akhir tahun 90-an melanda Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan. Krisis di bidang ekonomi telah menyebabkan kenaikan harga di segala bidang yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan proporsi masyarakat miskin.

Penandatanganan *Millennium Declaration* pada tahun 2000 membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus menurunkan proporsi penduduk miskinnya hingga angka 7,5% (setengah dari angka pada tahun 1990) dengan *deadline* pada tahun 2015. sejumlah program, pengentasan kemiskinan digulirkan namun angka kemiskinan di Indonesia masih belum bisa beranjak dari level diatas 10%. Tenggat waktu untuk pencapaian MDGs kurang dari 5 tahun, namun proporsi penduduk miskin di Indonesia masih diatas 10 persen.

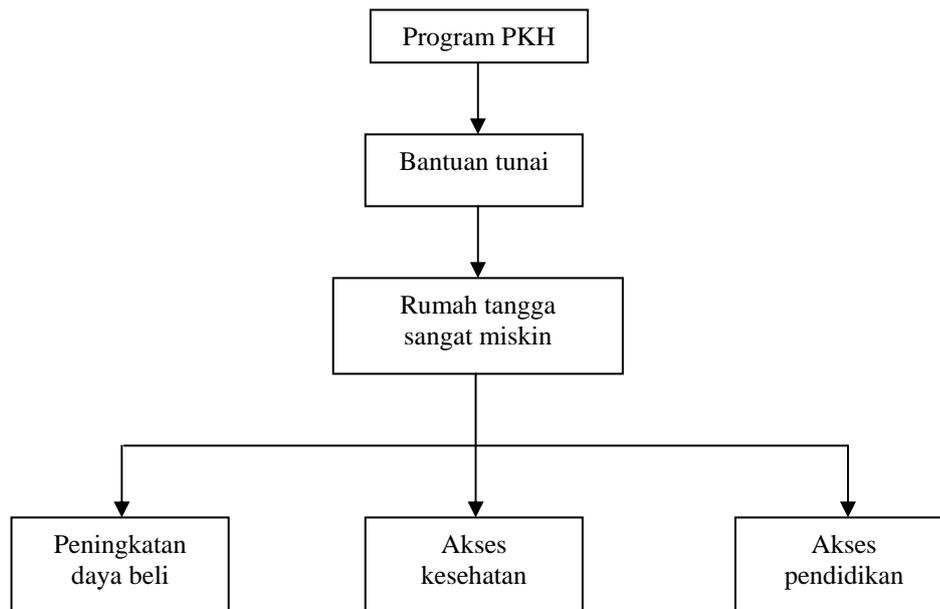
Banyak tuntutan bagi pemerintah agar bisa menekan angka penduduk miskin. Selain sebagai amanat dari konstitusi, pemerintah juga dikejar oleh target *Millennium Development Goals* (MDGs) dimana dalam salah satu butir tujuannya adalah menurunkan angka penduduk miskin menjadi setengahnya dari proporsi pada tahun 1990. Hal tersebut berdampak pada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam membuat program pengentasan kemiskinan, dimana fokus utamanya hanya pada angka-angka proporsi masyarakat miskin. Program yang ada selama ini merupakan formula instan untuk mengurangi masyarakat miskin – mengurangi proporsi masyarakat miskin dalam data statistik lebih tepatnya – tanpa menyentuh akar penyebab kemiskinan itu sendiri.

Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Pemberdayaan Keluarga Miskin

Tahun 2007 pemerintah Indonesia melaksanakan *pilot project* untuk program pengentasan kemiskinan berbasis bantuan tunai bersyarat atau *cash conditional transfer* (CCT) yang diadopsi dari program pengentasan kemiskinan di sejumlah negara di Amerika Latin dan Karibia. Program tersebut dinamakan Program Keluarga Harapan (PKH) dimana sasarannya adalah rumah tangga sangat miskin (RTSM). PKH didesain sebagai upaya untuk menggerakkan sistem pengaman sosial di Indonesia. Seperti program CCT lainnya, PKH juga memberikan bantuan tunai kepada sasaran, yaitu RTSM yang memiliki anak sekolah atau ibu hamil ataupun menyusui. Bantuan tunai tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya beli sasaran dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan (Kharisma 2008).

Menurut Kharisma (2008), pelaksanaan Program Keluarga Harapan memiliki tujuan utama untuk memotong rantai kemiskinan di Indonesia. Di satu

sisi, bantuan tunai yang diberikan dapat meningkatkan taraf hidup penduduk miskin melalui peningkatan konsumsi dan memulai suatu usaha kecil. Di sisi lain, program ini berupaya untuk meningkatkan kualitas generasi selanjutnya dari keluarga miskin dengan memberikan akses kepada ibu hamil dan anak-anak terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dalam tujuan jangka panjang, bantuan tunai bukan hanya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk miskin penerima program, namun juga dapat meningkatkan kualitas generasi selanjutnya sehingga lingkaran kemiskinan dapat dipotong dan membawa keluarga tersebut keluar dari belenggu kemiskinan.



Gambar 2 Konsep dasar Program Keluarga Harapan (PKH)

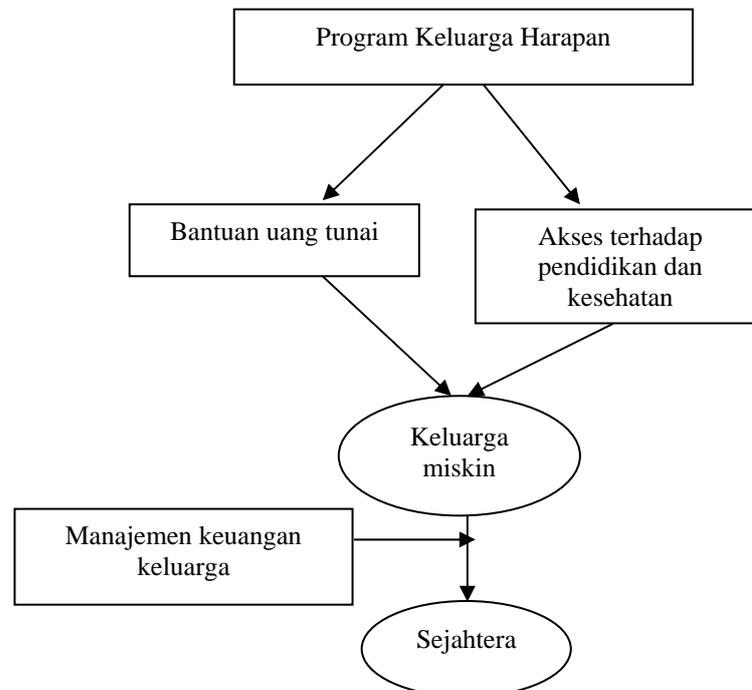
Program Keluarga Harapan juga menjadi titik awal dimulainya sistem perlindungan sosial yang lebih baik di Indonesia. Selama ini, pemerintah memiliki banyak program perlindungan sosial bagi penduduk miskin (BOS, Jamkesmas, BLT, Raskin), namun tidak dikordinasikan dengan baik terutama dalam hal sasaran dari program-program tersebut. PKH merupakan titik awal untuk sistem baru yang lebih baik dalam rangka pelaksanaan perlindungan sosial bagi penduduk miskin. Seluruh program perlindungan sosial dikordinasikan melalui satu program yaitu PKH, sehingga penerima program tersebut akan menjadi landasan untuk sasaran program-program lain seperti BOS, Jamkesmas, dan Raskin (Kharisma 2008).

Sebagai suatu program yang dirancang dengan konsep yang komprehensif, Program Keluarga Harapan diharapkan dapat menjadi tulang punggung program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program ini diharapkan bukan hanya dapat mengentaskan kemiskinan "sesaat", namun juga memiliki tujuan jangka panjang yakni memotong lingkaran kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia di keluarga miskin.

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Indonesia telah memasuki tahun ke tiga. Pada tahap awal pelaksanaan (tahun 2007) PKH dilaksanakan di 7 provinsi dengan sasaran sebanyak 388 ribu rumah tangga sangat miskin. Tahun 2008 jumlahnya meningkat menjadi 580 ribu RTMS di 13 provinsi, dan tahun 2009 sasan PKH menjadi 720 ribu RTMS di 13 provinsi (ADB 2009). Mengacu pada data BPS pada tahun 2007, terdapat sekitar 3,06 juta rumah tangga di Indonesia yang digolongkan sebagai RTSM dan layak menerima PKH. Hal tersebut berarti pelaksanaan PKH baru menyentuh sekitar 20% dari potensi sasaran seluruhnya.

Dari sisi keluarga sebagai penerima Program Keluarga Harapan, kemampuan keluarga untuk melakukan manajemen sumberdaya terutama dana bantuan dari program tersebut menjadi pertanyaan. Tentu pelaksanaan program akan menjadi sia-sia dan tidak akan mencapai tujuan jika keluarga sebagai penerima program tidak bisa memanfaatkan bantuan yang diberikan sebagaimana mestinya.



Gambar 3 Manajemen keuangan keluarga sebagai komplemen dalam Program Keluarga Harapan

Keluarga dengan pendapatan rendah cenderung lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masa kini atau sekarang. Sehingga seringkali pemberian bantuan tunai kepada penduduk miskin dimanfaatkan untuk konsumsi sesaat dan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Hasil temuan Simanjuntak (2010) pada keluarga penerima PKH di Kecamatan Darmaga pada tahun 2008 hingga 2009 menunjukkan bahwa sekitar 55,3% dana digunakan untuk keperluan pendidikan, 15,5% untuk kebutuhan makanan, dan hanya 0,5% yang digunakan untuk keperluan kesehatan. Selain itu, terdapat indikasi kecenderungan

menggunakan dana bantuan untuk keperluan membeli aset-aset rumah tangga, terlihat dari presentase kepemilikan sejumlah aset saat sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Temuan lainnya adalah meningkatnya jumlah keluarga contoh yang memiliki hutang dari sebelum program (47,3%) dan sesudah pelaksanaan program (82,7%). Hal tersebut disebabkan adanya pola pikir di kalangan keluarga contoh, bahwa mereka akan mendapatkan dana PKH sehingga berhutang sebelum dana PKH turun. Fakta-fakta tersebut sejalan dengan temuan lainnya bahwa lebih dari 70% contoh melakukan manajemen keuangan keluarga yang tergolong rendah baik sebelum ataupun sesudah pelaksanaan PKH.

Untuk itu, diperlukan suatu integrasi bimbingan manajemen keuangan keluarga bagi sasaran penerima Program Keluarga Harapan sebagai upaya mewujudkan tujuan program tersebut. Hal tersebut sejalan dengan yang dipaparkan oleh Alabi *et al* (2006) yang menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya sebatas keluarga miskin mendapatkan pendapatan, namun juga bagaimana keluarga memanfaatkan pendapatan tersebut secara efisien, sehingga diperlukan suatu bimbingan dan pelatihan dalam hal manajemen keuangan keluarga sebagai komplemen dari program pengentasan kemiskinan.

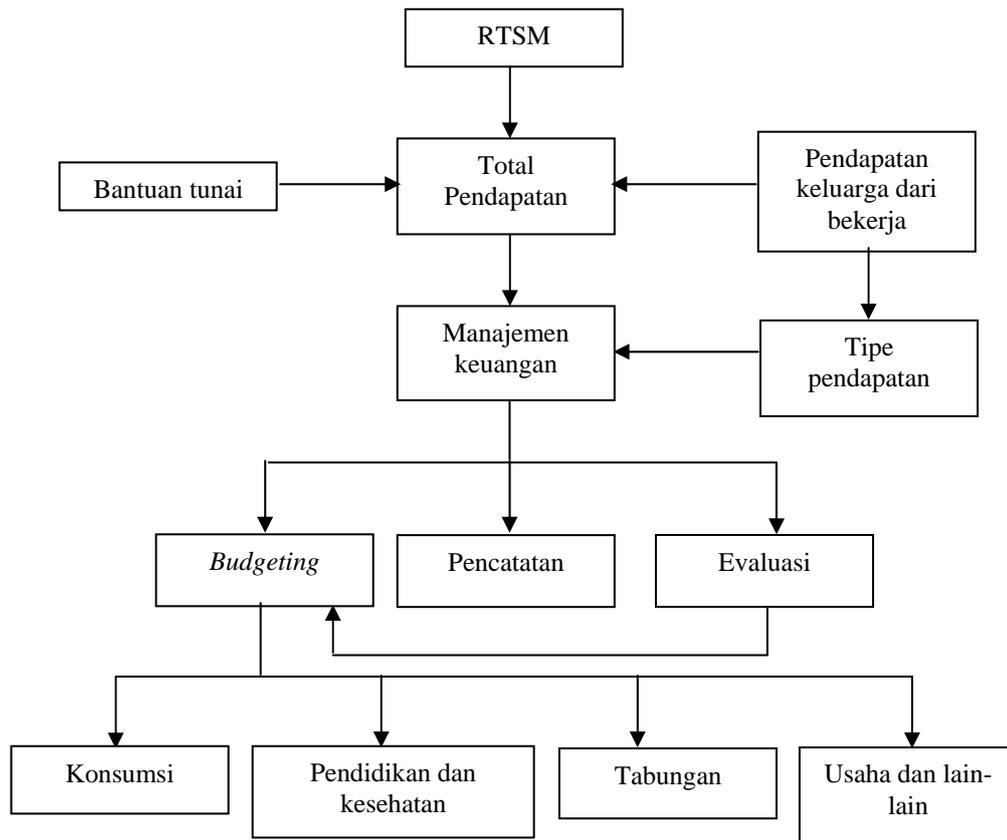
Selain itu, kelangkaan (*scarcity*) sumberdaya benar-benar nyata dan dirasakan oleh keluarga miskin. Untuk itu, seperti telah disebutkan oleh Latifah (2010) bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga miskin harus bisa mengelola sumberdaya yang dimiliki. Sehingga, manajemen sumberdaya keluarga bagi masyarakat miskin sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup dengan keterbatasan yang dimiliki.

Manajemen Keuangan bagi Keluarga Miskin Penerima PKH

Hasil Susenas pada Februari 1999 menyebutkan bahwa 87% dari masyarakat miskin hidup dalam rumahtangga dimana kepala keluarganya berpendidikan SD atau lebih rendah. Selain itu, 60% masyarakat miskin memiliki mata pencaharian sebagai petani dan 75% diantaranya hidup di daerah pedesaan (World Bank 2001).

Survey yang dilakukan oleh *Consumer Federation of America* pada tahun 1990 menyebutkan bahwa individu dengan pendapatan yang rendah memiliki pemahaman yang lebih rendah dalam hal pengelolaan keuangan daripada individu dengan penghasilnya yang lebih tinggi (Brobeck 2002 dalam Anderson *et al*). Melihat kenyataan tersebut, maka perlu ada penyesuaian dalam hal teknik dan pelaksanaan manajemen keuangan pada keluarga miskin. Terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan keluarga, yaitu manajemen pendapatan, melakukan pencatatan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen keuangan itu sendiri.

Secara umum, konsep manajemen keuangan keluarga penerima PKH diilustrasikan dalam Gambar 4. hal yang perlu diperhatikan adalah dalam hal *budgeting* atau penganggaran. Sudah seharusnya, keluarga sasaran PKH menalokasikan dana bantuan yang diterima untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kebiasaan untuk menunda konsumsi melalui menabung juga perlu dibudayakan pada keluarga sasaran PKH. Untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga, perlu juga dilakukan usaha dengan modal yang diambil dari dana bantuan yang didapatkan.



Gambar 4 Manajemen keuangan keluarga penerima PKH

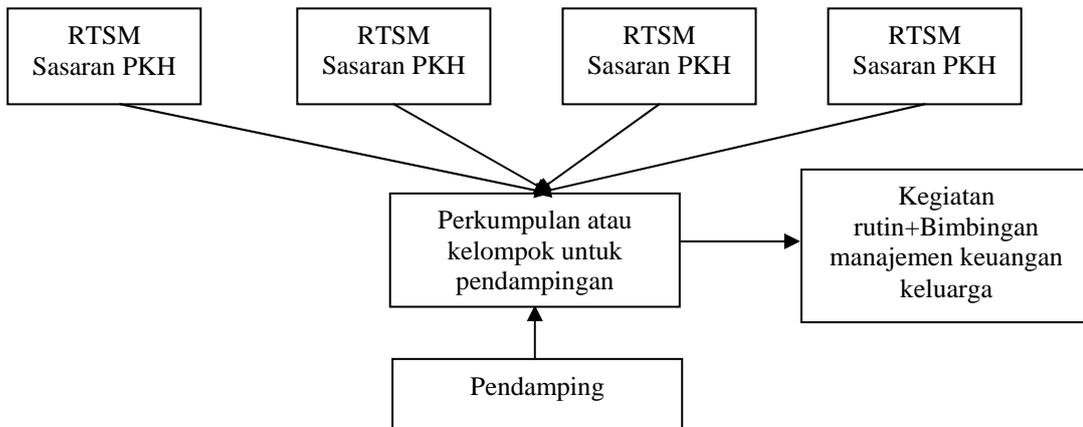
Pembimbingan Keluarga sasaran PKH untuk Menerapkan Manajemen Keuangan Keluarga

Telah dibahas sebelumnya bahwa secara umum karakteristik keluarga sangat miskin memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan berimplikasi pada pengetahuan mengenai masalah keuangan yang rendah pula. Untuk itu, keluarga sangat miskin penerima Program Keluarga Harapan perlu mendapatkan bimbingan untuk melakukan manajemen keuangan keluarga, agar bantuan yang diberikan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga tujuan dari pelaksanaan program tersebut dapat tercapai.

Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan PKH adalah pendamping yang bertugas untuk mendampingi tiap kelompok sasaran (setiap kelompok terdiri dari 20-25 peserta PKH) dalam proses awal program maupun dalam kegiatan rutin. Dalam rangka integrasi bimbingan manajemen keuangan keluarga bagi sasaran PKH, peran pendamping akan semakin vital. Pendamping yang akan membimbing setiap kelompok penerima PKH untuk melakukan kegiatan manajemen keuangan keluarga.

Hasil penelitian Simanjuntak (2010) terhadap pelaksanaan kegiatan PKH di Kecamatan Darmaga menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran belum merasakan manfaat dari adanya pendamping. Hanya 26,7% contoh yang merasa pernah dikunjungi oleh pendamping. Sebagian besar sasaran merasakan peran ketua kelompok yang lebih dominan dibandingkan pendamping. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan bias, karena ketua kelompok berasal dari keluarga penerima PKH dengan karakteristik yang hampir sama dengan

anggotanya. Untuk itu jumlah sasaran dalam kelompok perlu mendapatkan perhatian (tidak terlalu besar), faktor geografis, serta jumlah pendamping.



Gambar 5 Pendampingan sasaran PKH terintegrasi bimbingan manajemen keuangan keluarga

Selain itu, secara kelembagaan perlu ada perbaikan terkait dengan masalah pendampingan. Selama ini, pendamping melaporkan kegiatan dan permasalahannya kepada pihak UPPKH Kabupaten/ Kota. Pihak UUPKH Kabupaten/ Kota sendiri tentu membawahi atau mencakup pendamping dari berbagai Kecamatan, sehingga proses penyelesaian ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh pendamping menjadi kurang efektif. Untuk itu, diperlukan adanya suatu tim koordinasi di tingkat kecamatan yang akan mewadahi seluruh pendamping di kecamatan tersebut.

Hal yang paling penting adalah pembekalan bagi pendamping terkait dengan pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan manajemen keuangan keluarga. Sehingga dalam proses pembimbingan, pendamping benar-benar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sasaran PKH bisa merasakan manfaatnya. Revitalisasi dalam hal pendampingan perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan program ini. Jumlah pendamping, ukuran kelompok, dan intensitas pertemuan dalam rangka pembimbingan dan pemberian pengetahuan manajemen keuangan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan tersebut akan turut menentukan keberhasilan PKH.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Manajemen sumberdaya, terutama uang, sangat penting bagi keluarga agar dapat mengoptimalkan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Implementasi manajemen keuangan dalam keluarga sangat diperlukan terutama bagi keluarga miskin dimana kelangkaan sumberdaya (*scarcity*) benar-benar nyata

2. Bimbingan manajemen keuangan keluarga bagi keluarga sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya agar keluarga mampu mengalokasikan bantuan yang diberikan agar dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan pelaksanaan program tersebut dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan
3. Pelaksanaan bimbingan manajemen keuangan keluarga bagi keluarga sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) diintegrasikan dengan kegiatan pendampingan bagi kelompok-kelompok sasaran PKH yang telah ada dalam program tersebut
4. Revitalisasi proses pembimbingan perlu mendapatkan perhatian terkait kapasitas pembimbing, jumlah pembimbing, intensitas pembimbingan, dan ukuran kelompok

Saran

Pemerintah sebagai aktor utama penentu regulasi dalam hal program pengentasan kemiskinan perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan melakukan perbaikan. Pembimbingan manajemen keuangan keluarga bagi sasaran program tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka memberdayakan keluarga agar mampu mengalokasikan bantuan yang diberikan sebagaimana mestinya dan pada akhirnya dapat terbebas dari belenggu kemiskinan. Penelitian dan kajian lanjutan juga diperlukan untuk menguji efektivitas dan efisiensi dari ide mengenai integrasi manajemen keuangan keluarga dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

DAFTAR PUSTAKA

- Alabi, D. L. *et al.* 2006. *Factors Enhancing Effective Financial Management of Rural Women in Osun State*. Research Journal of Social Sciences, 1(1): 5-10, 2006.
- Eastwood, David W. 1985. *The Economics of Consumer Behaviour*. Allyn and Bacon, Inc.
- Guhardja S. *et al.* 1992. Diktat Manajemen Sumberdaya Keluarga. Bogor: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor
- Gunawan. 2009. Kondisi Keluarga Fakir Miskin. <http://www.depsos.go.id>. [21 Februari 2010]
- Hamid, A. 2007. Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan: Dari Jaring Pengaman Sosial Hingga PR. <http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=464> [21 Februari 2010]
- Karvof, Anatoli. 2009. Cerdas mengelola Keuangan Pribadi. Jakarta: Kompas Gramedia
- Kharisma, Dinar Dana. 2008. *Case Study of PKH (CCT Indonesia) In Sumba Barat and Kediri*. <https://www.appam.org/conferences/international/singapore2009/sessions/downloads/1201.pdf> [11 Maret 2010]
- Latifah, E. W. 2010. Analisis Persepsi, Sikap, dan Strategi Koping Keluarga Miskin Terkait Program Konversi Minyak Tanah ke LPG di Kota Bogor.[Skripsi]. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Megawangi, Ratna. 1999. Membiarkan Berbeda. Bandung: Mizan.
- Nickell, Paulena dan Dorsey, Jean Muir. 1959. *Management in Family Living*. New York: Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Simanjuntak, Megawati. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga dan Prestasi Belajar Anak pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH). [Tesis]. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Syafrian, D. 2009. Kemiskinan Struktural: Peran dan Kegagalan Negara. <http://dzulfian.myblogrepublika.com/index.php/tag/standar-kemiskinan/> [21 Februari 2010]
- United Nations. 2003. *The MDGs in Asia and The Pacific*. New York: United Nations.
- World Bank. 2001. *Constructing A New Strategy for Poverty Reduction*. Jalarta: World Bank.

LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup Peserta

1. Nama : Agus Surachman
 Tempat/ Tanggal Lahir : Sukabumi/ 09 Agustus 1989
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Babakan Raya 2 No. 218 Desa Babakan Kecamatan Darmaga Kabupaten Bogor 16680
 No. HP : 085710275853
 e-mail : surachman_agus@ymail.com

Riwayat Pendidikan

- 1995 - 2001 SDN Cisaat 2
 2001 - 2004 SMP Internat Al Kausar
 2004 - 2007 SMAN 1 Cibadak
 2007 - sekarang Program S1 Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

Riwayat Pekerjaan

- 2008-2009 Staf pengajar Bimbingan Belajar FORCES
 2009-2010 Asisten parktikum mata kuliah Perilaku Konsumen
 2009-sekarang Asisten praktikum mata kuliah Sosiologi Umum

Pelatihan

- 2008 Pelatihan Kepemimpinan, Direktorat Kemahasiswaan IPB
 2009 Pelatihan Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan UKM Terpilih, Direktorat Kemahasiswaan IPB
 2009 Pelatihan Film Dokumenter, Direktorat Kemahasiswaan IPB

Kepanitiaan

- 2009 Masa Perkenalan Fakultas Ekologi Manusia HERO 45
 2009 Masa Perkenalan Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Soulmate 45
 2009 Journalistic Fair 2009
 2009 Family and Consumer Day 2009

Prestasi

- 2001 Juara III Lomba Mata Pelajaran PPKN/ IPS Tingkat Provinsi Jawa Barat
 2007 Juara III *Debating Contest* Kab. Sukabumi
 2007 Juara I *News Report Contest* Univ. Ibnu Khaldun, Bogor

2008	Juara II LCT Ekonomi Umum Fakultas EKonomi dan Manajemen IPB
2008	10 Besar 2 nd SME Fakultas Ekonomi UI
2009	Juara III <i>National Essay Writing Competition</i> , Yayasan Anak Bangsa
2009	Juara II Tenis Meja Tunggal Putra 2 nd Espent
2010	Juara I Sineasta Award (<i>Documentary Film Competition</i>), Direktorat KEMahasiswaan IPB
2010	Grantee of IELSP batch 7 University of Arizona, USA (Belajar intensif Bahasa Inggris selama 2 bulan)

2. Nama : Astari Sukmaningtyas
 Tempat/ Tanggal Lahir : Serang, 04 Agustus 1989
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Babakan Tengah No.104 RT 04 RW
 08 Bogor 16680
 No. HP : 081932521875
 e-mail : astarisukmaningtyas@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

1994-1995	TK Indria Mandala Serang Banter
1995-2001	SD YPWKS 3 Cilegon, Banten
2001-2004	SMP Negeri 2 Cilegon, Banten
2004-2007	SMA Negeri 1 Kramat Watu, Banten
2007-Sekarang	Program S1 Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

Riwayat Pekerjaan

2010	Asisten praktikum mata kuliah Dasar-Dasar Komunikasi
------	--

Kepanitiaian

2008	Bounjor
2009	Masa Perkenalan Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Soulmate 45
2009	Family and Consumer Day 2009
2009	Launching Taman Bacaan SAMISAENA
2009	Bukti Cinta Lingkungan (BCL) BEM FEMA

3. Nama : Diara Mutiarani
 Tempat/ Tanggal Lahir : Serang, 27 Juli 1990
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Perwira No. 53, Dramaga-Bogor
 No. HP : 0856 7959 056
 e-mail : diaraajaib@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

1995-1996	TK Mandiri Karya Cilegon
1996-2002	SDN 4 Cilegon
2002-2005	SMPN 1 Cilegon
2005-2008	SMAN 1 Serang
2008-sekarang	Program S1 Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

Pelatihan

2007	Peningkatan kepemimpinan OSIS tingkat Nasional, Depok
2007	Pelatihan Mengelola Hidup dan Merencanakan Masa Depan (MHMMMD), Depok
2008	Pelatihan <i>Corel Draw</i> dan Bahasa Pemrograman Pascal, Nugraha Central Computer, Serang

Kepanitiaan

2009	Seminar <i>Technopreneurship</i> sebagai anggota divisi acara
2009	Seminar <i>Family and Consumer Day</i> sebagai anggota divisi acara
2010	Seminar <i>Grand Launching Leadership and Entrepreneurship School</i> sebagai anggota divisi <i>Public Relations & Human Resources and Development</i>
2010	Seminar <i>Capacity Building</i> sebagai anggota divisi acara